

# RENCANA AKSI 2020

BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LHK  
WILAYAH KALIMANTAN



## KATA PENGANTAR

Rencana Aksi Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) Wilayah Kalimantan tahun 2020 ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Kalimantan dalam waktu 1 (satu) tahun ke depan.

Rencana Aksi ini memuat perencanaan dan prognosis per Triwulan di Tahun 2020 lingkup Program Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan di dalam melaksanakan berbagai tugas yang diembankan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan berdasarkan Rencana Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Kalimantan yang berlandaskan Rencana Kerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan TA 2020, dengan hasil sesuai rencana yang diharapkan dan secara keseluruhan dapat mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan dengan pemanfaatan anggaran yang efektif dan efisien.

Dengan Rencana Aksi ini diharapkan adanya optimalisasi peran Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Kalimantan di dalam peningkatan efisiensi, efektifitas dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pada tahun-tahun selanjutnya.



Kepala Balai,

Subhan S.Hut, M.Si

NIP. 19730320 199903 1 004

# BAB I

## PENDAHULUAN

Rencana Aksi (Renaksi) Tahunan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan (BPPHLHK) Wilayah Kalimantan Tahun 2020 adalah dokumen yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diharapkan dapat memberikan gambaran singkat mengenai sasaran yang akan dicapai, kebijakan yang akan digunakan serta program dan kegiatan yang diprioritaskan oleh BPPHLHK Wilayah Kalimantan.

### I.1 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari Rencana Aksi Penetapan Kinerja TA 2020 adalah memberikan arah dan pedoman pada implementasi kegiatan yang dilakukan oleh BPPHLHK Wilayah Kalimantan. Tujuan dari Rencana Aksi ini adalah menyediakan peta jalan implementasi kegiatan lingkup BPPHLHK Wilayah Kalimantan sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Rencana aksi ini menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPPHLHK Wilayah Kalimantan.

## I.II LANDASAN HUKUM

Pelaksanaan kegiatan BPPHLHK Wilayah Kalimantan dilakukan dengan berpedoman pada regulasi yang ada, yaitu:

- Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.82 tahun 2019 tentang Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020;
- Peraturan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.12 tahun 2019 tentang Rencana Kerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020;

## BAB II

### RENCANA AKSI

Sesuai dengan perjanjian kerja BPPHLHK Wilayah Kalimantan TA 2020, telah disampaikan bahwa kinerja BPPHLHK Wilayah Kalimantan adalah tersedianya instrumen dan regulasi untuk mendukung kegiatan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang pelaksanaannya dilakukan oleh unit pelaksana teknis BPPHLHK Wilayah Kalimantan. Hal ini dapat dilihat dari indikator kerja kegiatan yang merupakan bagian dari sasaran program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tabel berikut:

Rencana Aksi Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan TA 2020 adalah sebagai berikut:

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET 2020
Meningkatnya ketaatan pelaku usaha/kegiatan terhadap izin lingkungan hidup dan peraturan perundang-undangan	Persentase pelaku usaha/ kegiatan terhadap izin lingkungan hidup dan peraturan perundang- undangan terkait bidang lingkungan hidup dan kehutanan meningkat	50 Persen
Terselesaikannya kasus penegakan hukum bidang lingkungan hidup dan Kehutanan	Jumlah Kasus yang dilakukan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan	219 Kasus P-21
Teramankannya hutan dari gangguan dan ancaman	Hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman	1.700.000 Hektar

Adapun kegiatan lingkup Eselon II di Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2020
Terlaksananya Pencegahan dan Pengamanan Terhadap Gangguan dan Ancaman Keamanan Kawasan Hutan di 34 Provinsi	Luas Kawasan Hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan	3.000.000 Hektar
	Jumlah Operasi Peredaran Hasil Hutan Illegal	110 Operasi
Meningkatnya Efektifitas Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	Sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan Melalui Pengadilan dan di luar Pengadilan	40 Kasus
	Sengketa Lingkungan Hidup terkait DAS Citarum yang diselesaikan	6 Kasus
Meningkatnya efektifitas penanganan pengaduan, pengawasan izin, izin lingkungan, izin PPLH dan PPU, ketaatan terhadap Sanksi Administrasi	Pengaduan, Pengawasan, dan Sanksi Administrasi yang ditangani	910 Perusahaan
	Pengaduan, Pengawasan, dan Sanksi Administrasi terkait DAS Citarum yang ditangani	90 Perusahaan
	PPLH yang ditingkatkan kapasitasnya	200 Orang
Meningkatnya jumlah kasus pidana LHK yang di tangani oleh PPNS LHK secara Profesional	Kasus tindak pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P- 21	173 Kasus P-21
	PPNS yang ditingkatkan kapasitasnya	210 Orang

Adapun kegiatan lingkup Eselon III di Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan tahun 2020 adalah sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2020
Luas Kawasan Hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan	375.000 Ha
Jumlah Operasi Peredaran Hasil Hutan Illegal	20 Operasi
Pengaduan, Pengawasan, dan Sanksi Administrasi yang ditangani	172 Perusahaan
Kasus tindak pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P-21	42 Kasus P-21
PPNS yang ditingkatkan kapasitasnya	4 Orang

### BAB III PENUTUP

Tercapainya indikator kerja kegiatan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan didukung oleh kontribusi penuh dari para pelaksana di unit pelaksana teknis lingkup Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan. Oleh karena itu, rencana aksi ini disusun sebagai acuan bagi pelaksana di lingkungan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan serta semua pemangku kepentingan dalam upaya penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan akibat Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Rencana aksi ini digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian upaya pengembangan sesuai dengan kepentingan dan kebijakan penyelenggaraan kegiatan, dengan memperhatikan penilaian yang dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi. Dengan disusunnya rencana aksi ini dapat mendorong penyelenggaraan program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan lingkup Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Wilayah Kalimantan secara berhasil-guna dan berdaya-guna dalam rangka mencapai sasaran program yang sebaik-baiknya. Upaya yang dilakukan dengan dedikasi, kerja keras dan bersungguh-sungguh serta dukungan dari semua pemangku kepentingan untuk pelaksanaan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan sangat diharapkan agar tujuan program maupun kementerian secara menyeluruh dapat tercapai.



BAB IV  
LAMPIRAN-LAMPIRAN

TABEL 1 - PROGNOSES CAPAIAN PROGRAM PER TRIWULAN BALAI GAKKUM KALIMANTAN TA 2020

Indikator Kinerja Program	Triwulan	Triwulan	Triwulan	Triwulan	Target 2020	Satuan
	I	II	III	IV		
Persentase pelaku usaha/kegiatan terhadap izin lingkungan hidup dan peraturan perundang-undangan terkait bidang lingkungan hidup dan kehutanan meningkat *	10	15	30	50	50	Persentase *
Jumlah Kasus yang dilakukan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan	9	11	14	8	42	Kasus P-21 **
Hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman	85.000	110.000	110.000	70.000	375.000	Hektar **

Keterangan:

\* = Target pencapaian Non Akumulatif;

\*\* = Target pencapaian Akumulatif (TW I + TW II + TW III + TW IV)

*TABEL 2 PROGNOSIS CAPAIAN KEGIATAN PER TRIWULAN BALAI GAKKUM KLHK TA 2020;*

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Target 2020	Satuan
Luas Kawasan Hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan	85.000	110.000	110.000	70.000	375.000	Hektar
Jumlah Operasi Peredaran Hasil Hutan Illegal	9	6	4	1	20	Operasi
Pengaduan, Pengawasan, dan Sanksi Administrasi yang ditangani	41	49	46	36	172	Perusahaan
Kasus tindak pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P- 21	9	11	14	8	42	Kasus P-21
PPNS yang ditingkatkan kapasitasnya	0	0	4	0	4	Orang

Keterangan:

Target pencapaian Akumulatif (TW I + TW II + TW III + TW IV)

TABEL 3 PROGNOISIS CAPAIAN KEGIATAN PER BULAN BALAI GAKKUM KLHK TA 2020;

Indikator Kinerja Program	Bulan Ke-*												Satuan
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Persentase pelaku usaha/kegiatan terhadap izin lingkungan hidup dan peraturan perundang-undangan terkait bidang LHK meningkat	0%	5%	10%	12%	14%	15%	18%	26%	30%	38%	46%	50%	Persentase *
Jumlah Kasus yang dilakukan penegakan hukum LHK	1	2	6	4	4	3	4	5	5	4	3	1	Kasus P-21 **
Hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman	20 Ribu	30 Ribu	35 Ribu	35 Ribu	30 Ribu	45 Ribu	30 Ribu	30 Ribu	50 Ribu	20 Ribu	30 Ribu	20 Ribu	Hektar **

Keterangan:

\* = Target pencapaian Non Akumulatif;

\*\* = Target pencapaian Akumulatif (TW I + TW II + TW III + TW IV)



Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK  
Wilayah Kalimantan

**2020**